

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kebutuhan. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Selama hidupnya manusia akan senantiasa berpikir dan berbuat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Kebutuhan yang berkaitan dengan upaya manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya disebut kebutuhan hidup manusia. Manusia akan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mengikuti kegiatan pendidikan merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan selalu menghasilkan Sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualitas tinggi. Manusia yang sudah mendapatkan pendidikan akan memiliki kemampuan dalam berbagai hal seperti pengetahuan, kreativitas, *skill*, dan sebagainya yang dapat membuat orang tersebut mampu bersaing di masyarakat. Semakin tinggi dan semakin maju persaingan di masyarakat, maka kecakapan yang harus dimiliki oleh setiap manusia akan semakin berkembang. Oleh karena itu, pada saat ini dibutuhkan individu-individu yang memiliki kecakapan kerja yang tinggi agar mampu bersaing di masyarakat.

Berbagai cara dilakukan oleh manusia dalam memperoleh pendidikan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Guza (2009, hlm. 244) menjelaskan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan memiliki makna yang lebih luas, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan tidak saja dilakukan pada ruang lingkup persekolahan (jalur pendidikan formal), namun juga dapat dilaksanakan diluar lingkup persekolahan (jalur pendidikan nonformal) dan pendidikan pada keluarga (jalur pendidikan

informal). Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi manusia sehingga pendidikan dapat dilaksanakan dimana saja dan kapan saja. Pendidikan juga memiliki peranan yang hakiki dalam pembangunan suatu bangsa.

Fungsi pendidikan bagi manusia yaitu untuk memperbaiki kehidupannya agar semakin meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia membutuhkan pendidikan sebagai pegangan hidup agar dapat terus bertahan di zaman yang terus berkembang setiap harinya. Tujuan pendidikan yaitu untuk membentuk kepribadian manusia agar mempunyai intelektual yang tinggi, mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh dirinya dan lingkungan disekitarnya, serta mempunyai sikap dan sifat yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.

Eitzen dan Maxsine dalam Marzuki (2012, hlm.88) menyatakan bahwa di setiap masyarakat ada kekuatan terstruktur yang bekerja untuk mengadakan perubahan dan ada pula yang menguasai stabilitas. Keduanya diperlukan untuk kelangsungan masyarakat itu sendiri. Misi pendidikan adalah perubahan tingkah laku, perubahan nilai seseorang yang terjadi melalui pemberian pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap oleh para pendidik. Perubahan yang terjadi pada individu akan berdampak pada perubahan kelompok dan masyarakat secara keseluruhan. Sebuah proses yang menghasilkan adanya perubahan dalam setiap individu atau kelompok terhadap sesuatu yang lebih baik dengan menggunakan usaha mandiri disebut pemberdayaan.

Menurut Dhal dalam Mardikanto dan Soebiato (2012, hlm.33) menyatakan bahwa pemberdayaan berasal dari kata *empowerment*. Sangat berkaitan dengan kekuatan atau kekuasaan (*power*). Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan “kekuatan” atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak yang lainnya lagi.

Berdasarkan pengertian pemberdayaan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yaitu pemberian daya atau kekuatan kepada seseorang karena dia dianggap tidak berdaya atau kekuatan yang dimiliki sangat kecil sehingga hampir

tidak bias berbuat apa-apa. Adanya pemberdayaan pada masyarakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

Salah satu jalur pendidikan yang dapat mengantarkan kita pada kegiatan pemberdayaan adalah melalui pendidikan nonformal (pendidikan luar sekolah). Sebagaimana menurut Comb (dalam Sudjana, 2010, hlm.21) yang mengemukakan bahwa:

Pendidikan Non Formal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.

Pendidikan nonformal dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian kelima pasal 26 ayat 1-7 Guza (2009, hlm. 255) yang berbunyi:

(1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/ atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/ atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan mengenai pendidikan nonformal dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat dilihat

bahwa pada jalur pendidikan ini terdapat kurikulum pembelajaran yang menekankan pada pengembangan diri dan kecakapan hidup seseorang. Senada dengan hal itu, Sudjana (2004, hlm. 3) menjelaskan bahwa :

Pendidikan mencakup semua komunikasi yang terorganisasi dan berkelanjutan yang diselenggarakan dalam kehidupan nyata di masyarakat, lingkungan keluarga, lembaga-lembaga, dunia kerja dan lingkungan kehidupan lainnya. Dalam kaitannya dengan pembangunan di negara-negara berkembang, meliputi pengembangan semua aspek kehidupan dengan menggarap program-program pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, lapangan usaha, kewirausahaan dan pembangunan pada umumnya.

Adapun satuan pendidikan non formal itu terdiri dari kelompok belajar, lembaga kursus dan pelatihan, majelis ta'lim, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan sejenis.

Program Pendidikan Luar Sekolah dapat dikatakan berhasil apabila sumber daya manusia atau suatu lembaga dapat mengelola dan menjalankan setiap program agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, peran pengelola sangat dibutuhkan dalam pengelolaan program Pendidikan Luar Sekolah. Friedman (1998, hlm.289) menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada perspektif (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Pada saat ini banyak sekali terdapat lembaga-lembaga yang mengadakan program-program pendidikan yang bertujuan untuk mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat. Salah satu lembaga yang menyelenggarakan program-program yang dapat memberikan keterampilan kepada masyarakat agar dapat berdaya yaitu balai latihan kerja (BLK). Balai Latihan Kerja adalah suatu lembaga pelatihan yang menyelenggarakan program-program pelatihan kecakapan hidup bagi masyarakat yang ingin mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahlian dibidangnya masing-masing. BLK merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar jalur pendidikan nonformal.

Balai Latihan Kerja tersebar di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya ada di Kabupaten Sumedang. UPTD Balai Latihan Kerja ini mengadakan

program-program pelatihan kerja yang diadakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan *skill* kerja masyarakat Kabupaten Sumedang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB VI bagian kelima pasal 26 ayat 2 dalam Guza (2009, hlm. 255) bahwa “Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional”.

Dan ayat 5, bahwa :

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BLK Sumedang merupakan lembaga peninggalan Departemen Tenaga Kerja (Depanaker) Kabupaten Sumedang. Pada saat ini BLK Kabupaten Sumedang dikelola oleh Pemerintahan Kabupaten Sumedang melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transimgrasi (Dinsosnakertrans). BLK Kabupaten Sumedang dipergunakan sebagai lembaga yang menyelenggarakan program pelatihan kecakapan hidup untuk meningkatkan kecakapan kerja peserta. Menurut Brolin dalam Anwar (2012, hlm. 20) bahwa :

Life skills constitute a continuum of knowledge and aptitude that are necessary for a person to function effectively and to avoid interruptions of employment experience. Maksudnya kecakapan hidup merupakan pengetahuan dan bakat yang diperlukan seseorang agar dapat berfungsi secara efektif dan dapat memecahkan masalah dalam bekerja. Dengan demikian *life skills* dapat dinyatakan sebagai kecakapan hidup.

Pelatihan keterampilan kerja yang biasa diselenggarakan di BLK Kabupaten Sumedang, di antaranya keterampilan menjahit, otomotif (bengkel sepeda motor dan mobil), komputer, listrik, mengelas, dan peternakan. Pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja ini berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan yang dilaksanakan oleh pengelola BLK agar dapat mengetahui kebutuhan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Lalu dirancanglah suatu pelatihan yang dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi, pengetahuan, dan peningkatan kesejahteraan hidup peserta pelatihan. Sedangkan sasaran dari

program pelatihan keterampilan kerja di BLK ini yaitu masyarakat pencari kerja (pengangguran) yang ingin berlatih berbagai ilmu keterampilan.

Pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sumedang berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Mulai dari perencanaan program, pelaksanaan program, sampai dengan evaluasi program. Pengelola BLK Kabupaten Sumedang juga berperan dalam mencari calon peserta pelatihan dengan menggunakan beberapa media seperti media televisi, brosur, dan sebagainya. Pada saat ini di Kabupaten Sumedang terdapat satu stasiun televisi yang mengudara. Pengelola BLK Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan stasiun televisi tersebut untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelatihan yang akan diselenggarakan.

Pelaksanaan program pelatihan kerja di BLK Sumedang mendapat anggaran pengelolaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), serta tambahan anggaran dari APBD Sumedang. Oleh karena itu, setiap peserta tidak dipungut biaya dalam mengikuti pelatihan di BLK Sumedang. Peserta dilatih berdasarkan keterampilan yang diinginkan sampai mahir dan siap bekerja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Pengelola Balai Latihan Kerja dalam Memberdayakan Peserta Melalui Pelatihan Kecakapan Hidup (Studi Deskriptif di UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumedang)”**.

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah :

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumedang. Sarana dan prasarana yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan peserta dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja. Keadaan sarana dan prasarana yang ada pun masih perlu diperbaiki karena ada beberapa bangunan yang sudah tidak layak untuk digunakan.
2. Kurangnya tenaga pengajar/instruktur yang disediakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumedang sehingga harus mendatangkan instruktur yang berasal dari luar BLK.
3. Peserta pelatihan merupakan masyarakat Kabupaten Sumedang yang masih belum memiliki pekerjaan (pengangguran). Selain itu, sumber daya yang

dimiliki oleh masing-masing peserta berbeda-beda sehingga diperlukan peran dari pengelola yang maksimal.

4. Jumlah peserta yang dapat mengikuti pelatihan dibatasi sehingga para calon peserta pelatihan harus mengikuti tes terlebih dahulu.
5. Instruktur memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar peserta pelatihan. Agar peserta pelatihan dapat lebih antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan.

Fokus masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana peran pengelola Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumedang dalam memberdayakan peserta melalui pelatihan kecakapan hidup”

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana proses pelatihan kecakapan hidup dalam memberdayakan peserta di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh pengelola Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sumedang dalam memberdayakan peserta?
3. Bagaimana hasil yang dicapai dari dari pelatihan kecakapan hidup yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten (BLK) Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas yaitu:

1. Mendeskripsikan peran pengelola Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumedang dalam proses pelaksanaan pelatihan kecakapan hidup dalam memberdayakan peserta.
2. Mendeskripsikan data tentang strategi yang dilakukan oleh pengelola Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumedang dalam pengelolaan pembelajaran pada program pendidikan kecakan hidup untuk memberdayakan peserta.
3. Mendeskripsikan data tentang hasil yang dicapai dari pelatihan kecakapan hidup yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Sumedang.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai salah satu upaya pengelola dengan masyarakat dalam memberdayakan masyarakat Kabupaten Sumedang melalui pelatihan kerja yang dapat meningkatkan *skill* masyarakat agar siap bekerja. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dan salah satu sumber belajar oleh mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi masyarakat agar terus belajar dan mengembangkan kemampuan yang terdapat dalam dirinya sehingga mereka mampu berdaya dengan kemampuan mereka sendiri.

b. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti lanjutan yang tertarik mengembangkan penelitian mengenai pengelolaan pelatihan kerja dalam memberdayakan masyarakat Kabupaten Sumedang.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengelola dan instruktur lembaga khususnya UPTD BLK Kabupaten Sumedang sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan dalam kegiatan pelatihan kerja selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia (2014, hlm. 17) mengemukakan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : pada bab I penulis menguraikan pembahasan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : pada bab II penulis menguraikan kajian teori (studi pustaka) yang mendukung terhadap tema permasalahan penelitian, yaitu tujuan tentang teori persepsi yang didalamnya memaparkan pendapat para ahli.

BAB III : pada bab III penulis menguraikan pembahasan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, lokasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data.

BAB IV : pada bab IV penulis menguraikan pembahasan mengenai temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V : pada bab V penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.